

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON

Shelly A. C. Tiwow ¹, Susy A. Marentek ², Alfrets Daleno ³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : shellytiwow02@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the internal control system in the cash disbursement process at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Tomohon City. Several issues were identified in the implementation of internal controls, including delays in submitting documents to the expenditure treasurer and data entry errors in the regional government information system, both of which may hinder the disbursement process and reduce the accuracy of financial information. This research employs a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation over a four-month period starting in May 2024. The data were analyzed to assess the alignment of existing practices with fundamental internal control principles, such as segregation of duties, clarity of organizational structure, authorization procedures, and proper documentation. The results indicate that although internal controls over cash disbursements have been implemented, they have not fully met the criteria for effectiveness. The organizational structure does not clearly define the responsibilities of expenditure and revenue treasurers, nor the roles of staff in each division. Additionally, the absence of a cash disbursement flowchart creates ambiguity regarding the process sequence and critical control points. Therefore, improvements are needed in procedural documentation, development of process flowcharts, and reinforcement of task segregation to enhance the effectiveness of internal control in managing cash disbursements.

Keywords: *Internal Control System; Cash Disbursement; Local Government Financial Management; Control Effectiveness; Tomohon Regional Financial Agency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada proses pengeluaran kas di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian internal meliputi keterlambatan penyampaian berkas kepada bendahara pengeluaran serta terjadinya kesalahan input data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang dapat menghambat proses pencairan anggaran dan menurunkan akurasi informasi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi selama empat bulan sejak Mei 2024. Data dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik pengendalian internal dengan prinsip-prinsip dasar pengendalian, termasuk pemisahan tugas, kejelasan struktur organisasi, otorisasi transaksi, dan dokumentasi prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pengeluaran kas telah diterapkan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas karena struktur organisasi tidak menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, serta staf pada masing-masing bidang. Selain itu, tidak tersedianya bagan alir proses pengeluaran kas menyebabkan kurangnya kejelasan alur dan titik-titik pengendalian yang penting.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan dokumentasi prosedur, penyusunan bagan alir proses, serta penegasan pembagian tugas untuk memperkuat efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan pengeluaran kas.

Kata-kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Efektivitas Pengendalian, BPKPD Kota Tomohon

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tata kelola yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance. Salah satu komponen utama dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah pengendalian internal, yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional, termasuk pengeluaran kas, berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian internal dipahami sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Mulyati et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal bukan hanya sekadar dokumen prosedural, tetapi merupakan mekanisme yang harus diintegrasikan dalam setiap tahapan kerja organisasi, khususnya pada instansi pemerintah yang memiliki tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengeluaran kas merupakan aktivitas yang sangat krusial karena terkait langsung dengan realisasi anggaran, pertanggungjawaban belanja daerah, serta pencapaian program pemerintah. BPKPD Kota Tomohon sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan akurasi proses keuangan tersebut. Namun, berdasarkan permasalahan yang ditemukan, masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyampaian berkas kepada bendahara pengeluaran dan kesalahan dalam memasukkan data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang dapat menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan realisasi anggaran, hingga ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi fisik anggaran. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam struktur pengendalian internal, terutama pada aspek pemisahan tugas, otorisasi, koordinasi antarbagian, serta dokumentasi prosedur. Menurut pandangan teori, efektivitas pengendalian internal membutuhkan kejelasan struktur organisasi, pemisahan fungsi yang memadai, serta sistem otorisasi yang mampu meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan (Deleng & Dekrita, 2023).

Lebih lanjut, unsur dokumentasi turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah sistem pengendalian internal. Prosedur yang terdokumentasi dengan baik, termasuk adanya flowchart yang memetakan alur pengeluaran kas, membantu memastikan bahwa setiap tahapan proses memiliki titik pengendalian yang jelas dan dapat dievaluasi. Ketidakadaan flowchart pada BPKPD Kota Tomohon menunjukkan bahwa proses pengeluaran kas belum tergambar secara sistematis, sehingga menyulitkan identifikasi titik kelemahan maupun area yang memerlukan perbaikan. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa dokumentasi alur proses dan titik pengendalian menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses keuangan pada instansi pemerintah (Dewi & Dewi, 2023). Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada BPKPD Kota Tomohon, menilai efektivitasnya, serta memberikan masukan untuk penguatan sistem yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui implementasi pengendalian internal yang lebih terstruktur dan optimal.

LANDASAN TEORI

Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui proses yang efektif, efisien, reliabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dibentuk untuk memastikan terjaganya aset, akurasi informasi keuangan, serta kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan. Menurut teori klasik, sistem pengendalian internal bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kelemahan dalam struktur organisasi (Lestari & Nurodin, 2025). Dalam konteks sektor publik, pengendalian internal juga merupakan instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang melibatkan penggunaan dana publik (Rosidah et al., 2023). Oleh karena itu, kualitas pengendalian internal menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas tata kelola keuangan daerah.

Kerangka pengendalian internal yang paling banyak digunakan adalah kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang menetapkan lima komponen utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian mencakup nilai-nilai integritas, struktur organisasi, dan kultur organisasi yang mendukung pelaksanaan pengendalian. Penelitian menyebutkan bahwa lingkungan pengendalian merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan seluruh komponen pengendalian internal (Sinambela & Samsul, 2021). Selanjutnya, penilaian risiko merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam sektor publik, risiko yang sering muncul mencakup keterlambatan proses administrasi, kesalahan pencatatan, dan kurangnya dokumentasi, yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan (Pratama & Isra, 2025). Aktivitas pengendalian meliputi prosedur seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas, serta pengawasan fisik atas aset, yang semuanya dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan (Febrian et al., 2025).

Komponen berikutnya dalam kerangka COSO adalah informasi dan komunikasi, yang menekankan pentingnya sistem informasi yang mampu menyajikan data keuangan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah sistem informasi yang baik memungkinkan instansi pemerintah mengelola pengeluaran kas secara sistematis karena setiap transaksi tercatat dan terdokumentasi dengan jelas (Manjaleni & Apriliyanti, 2024). Dalam organisasi pemerintahan daerah, keberadaan sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pengendalian internal dapat diimplementasikan secara efektif pada setiap proses transaksi. Komponen terakhir dari COSO adalah pemantauan, yaitu kegiatan penilaian berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan semestinya dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemantauan yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internal tidak berfungsi dengan optimal karena masalah yang muncul tidak ditindaklanjuti atau diidentifikasi secara tepat waktu (Fitriani & Destia, 2024).

Dalam kaitannya dengan pengeluaran kas, pengendalian internal diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai prosedur, didukung dokumen yang lengkap, serta telah melewati tahapan otorisasi yang sesuai. Pengeluaran kas yang tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat cenderung menimbulkan risiko seperti keterlambatan pencairan anggaran, ketidakakuratan informasi, penyalahgunaan dana, hingga ketidaksesuaian antara belanja dan anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa efektivitas pengendalian internal dalam pengeluaran kas sangat bergantung pada pemisahan tugas yang jelas, dokumentasi prosedur yang lengkap, dan kelengkapan bagan alir atau flowchart yang menggambarkan setiap tahapan proses (Putri & Riharjo, 2025). Flowchart tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi titik pengendalian dan potensi risiko yang mungkin muncul dalam proses pengeluaran kas. Dengan demikian,

landasan teori mengenai sistem pengendalian internal dan komponen-komponennya menjadi dasar penting dalam menganalisis efektivitas pengendalian internal pengeluaran kas di BPKPD Kota Tomohon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dalam proses pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif terkait struktur organisasi, prosedur kerja, dan mekanisme pengendalian yang diterapkan dalam lingkungan kerja instansi pemerintah daerah. Objek penelitian adalah proses pengeluaran kas, yang meliputi tahapan pengajuan berkas, pemeriksaan dokumen, pencairan dana, pencatatan transaksi, serta penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai media pengelolaan data keuangan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan bendahara pengeluaran, staf bidang terkait, serta pejabat struktural yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengetahui alur kerja, interaksi antarbagian, dan potensi kelemahan dalam sistem pengendalian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban, struktur organisasi, serta dokumen pendukung lain yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga informasi yang diperoleh dapat diolah menjadi temuan yang sistematis dan bermakna. Setiap temuan dianalisis dengan membandingkannya terhadap prinsip-prinsip pengendalian internal, seperti pemisahan tugas, otorisasi, dokumentasi prosedur, serta mekanisme pemantauan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini berlangsung selama empat bulan, dimulai dari Mei 2024, sehingga memberikan ruang yang cukup untuk memahami pola kerja, mengidentifikasi hambatan, dan menilai efektivitas penerapan sistem pengendalian internal secara lebih holistik. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan mampu memberikan gambaran akurat mengenai kondisi aktual pengendalian internal pengeluaran kas di BPKPD Kota Tomohon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal pada proses pengeluaran kas di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Berdasarkan temuan lapangan, salah satu permasalahan utama terletak pada keterlambatan penyampaian berkas dari setiap bidang kepada bendahara pengeluaran. Keterlambatan ini berasal dari kurangnya koordinasi antarpelaksana kegiatan, tidak adanya batas waktu penyampaian berkas yang diatur secara formal, serta volume pekerjaan yang meningkat pada periode tertentu, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi dokumen membutuhkan waktu lebih lama, sehingga pencairan kas tertunda dan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program kerja.

Selain itu, kesalahan dalam memasukkan data ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga menjadi temuan signifikan. Kesalahan input meliputi salah memilih kode rekening belanja, ketidaktepatan pengisian informasi nominal, serta ketidaksesuaian antara data dokumen fisik dan data yang diunggah dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi operator SIPD masih bervariasi, dan tidak semua staf mendapatkan pelatihan rutin terkait pembaruan sistem maupun pedoman penginputan data. Kesalahan input ini memiliki implikasi serius karena dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan, memperlambat proses verifikasi, dan berpotensi menyebabkan revisi data berulang.

Struktur organisasi BPKPD Kota Tomohon juga memperlihatkan kelemahan dalam aspek pemisahan tugas. Meskipun secara umum terdapat pembagian fungsi antara bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, serta staf bidang teknis, namun uraian tugas tersebut tidak tertuang secara jelas dalam dokumen formal organisasi. Observasi menunjukkan bahwa beberapa staf merangkap tugas, seperti melakukan pemeriksaan berkas sekaligus membantu proses input ke sistem, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi yang dapat meningkatkan risiko kesalahan maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Pemisahan tugas merupakan unsur pokok pengendalian internal, sehingga ketiadaannya berpengaruh signifikan terhadap efektivitas proses pengeluaran kas.

Dokumentasi prosedur juga menjadi salah satu kelemahan mendasar. BPKPD Kota Tomohon tidak memiliki bagan alir (flowchart) yang menjelaskan alur pengeluaran kas mulai dari pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan dana. Ketiadaan flowchart membuat pelaksanaan pengeluaran kas lebih banyak mengandalkan kebiasaan kerja dan pengalaman staf dibanding prosedur baku yang terdokumentasi dengan jelas. Tanpa dokumentasi alur, evaluasi titik pengendalian menjadi sulit dilakukan, dan potensi terjadinya inkonsistensi antarstaf semakin besar, terutama dalam kondisi adanya rotasi pegawai atau pergantian operator.

Dari sisi aktivitas pengendalian, beberapa prosedur seperti verifikasi dokumen, pemeriksaan kelengkapan berkas, dan otorisasi sudah dilakukan, tetapi tidak selalu konsisten. Verifikasi sering dilakukan tanpa pengecekan mendalam karena waktu yang terbatas dan tingginya beban kerja. Rekonsiliasi data juga belum dilakukan secara berkala, sehingga apabila terdapat perbedaan antara catatan manual dan sistem, masalah baru disadari ketika pemeriksaan telah memasuki tahap akhir. Selain itu, mekanisme pemantauan internal belum berjalan dengan baik. Tidak ada evaluasi rutin mengenai kesalahan berulang, keterlambatan proses, atau efisiensi alur pengeluaran kas. Padahal, pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk menilai efektivitas pengendalian internal dari waktu ke waktu.

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara umum BPKPD Kota Tomohon telah menerapkan unsur-unsur pengendalian internal, seperti aktivitas pengendalian, otorisasi, dan penggunaan sistem informasi. Namun, implementasinya masih belum maksimal karena lemahnya pemisahan tugas, keterbatasan dokumentasi formal, belum optimalnya kompetensi operator SIPD, serta kurangnya evaluasi dan pemantauan berkala. Situasi ini menandakan bahwa meskipun struktur dasar pengendalian internal telah tersedia, diperlukan penguatan sistematis agar seluruh komponen pengendalian dapat bekerja secara sinergis dalam mendukung efektivitas pengeluaran kas. Dengan perbaikan pada struktur organisasi, dokumentasi prosedur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses pengeluaran kas dapat berjalan lebih akuntabel, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal telah berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas sebagaimana yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Secara umum, mekanisme pengendalian seperti verifikasi dokumen, penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta prosedur otorisasi telah diterapkan, namun implementasinya masih belum konsisten dan belum didukung oleh dokumentasi yang memadai.

Keterlambatan penyampaian berkas dari setiap bidang kepada bendahara pengeluaran menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam kelancaran proses pengeluaran kas. Selain itu, masih ditemukan kesalahan input data dalam SIPD, yang menunjukkan bahwa kompetensi operator serta pengawasan internal belum optimal. Struktur organisasi BPKPD juga memperlihatkan kelemahan pada pemisahan tugas, di mana peran dan tanggung jawab bendahara maupun staf teknis tidak diuraikan secara jelas

dalam dokumen formal. Ketidakjelasan ini menciptakan potensi tumpang tindih fungsi dan menurunkan akuntabilitas.

Ketiadaan flowchart alur pengeluaran kas semakin memperbesar risiko inkonsistensi prosedur, karena alur kerja tidak terdokumentasi secara baku. Padahal, flowchart merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap tahapan memiliki titik pengendalian yang jelas dan dapat dievaluasi. Selain itu, mekanisme pemantauan internal belum berjalan secara optimal, ditandai dengan tidak adanya evaluasi berkala terkait permasalahan yang muncul secara berulang seperti keterlambatan proses atau kesalahan pencatatan.

Dengan demikian, meskipun unsur dasar sistem pengendalian internal sudah diterapkan di BPKPD Kota Tomohon, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pemisahan tugas, penetapan prosedur tertulis termasuk flowchart, peningkatan kompetensi staf, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian secara berkala. Perbaikan-perbaikan ini akan membantu memastikan bahwa proses pengeluaran kas berjalan lebih tertib, akurat, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Deleng, M. R., & Dekrita, Y. A. (2023). ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PUSKOPDIT SWADAYA UTAMA MAUMERE. *Strategi*, 13(1), 23–32.
- Dewi, R., & Dewi, T. P. (2023). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 142. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14, 142–150.
- Febrian, P. B., Habiby, M., & Iskandar, A. (2025). Pengaruh Sistem Otorisasi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Klien di Kantor Akuntan. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(2), 96–102.
- Fitriani, L., & Destia, S. (2024). EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (STUDI KASUS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI X). *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 4(1), 1–12.
- Lestari, W., & Nurodin, I. (2025). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD (KECURANGAN). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2575–2594.
- Manjaleni, R., & Apriliyanti, I. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pengeluaran Kas. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4, 13472–13486.
- Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *AKUNTAPEDIA*, 1(1), 60–71.
- Pratama, P., & Isra, M. (2025). TINJAUAN LITERATUR PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *J-MABISYAH*, 6(1), 35–45.
- Putri, S. F., & Riharjo, I. B. (2025). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT INTI ALASINDO ENERGY. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 14(1), 1–15.
- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENCEGAHAN FRAUD DIINSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KANTOR KEC. CIWIDEY) Idah. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- Sinambela, E. A., & Samsul, A. (2021). STUDI TENTANG KINERJA KARYAWAN DITINJAU DARI KEBERADAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL. *REALIBLE ACCOUNTING JOURNAL*, 1(1), 58–70.